Bibit

Volume 5, No. 4 Tahun 2011

MAJALAH INFORMASI PERBIBITAN TERNAK

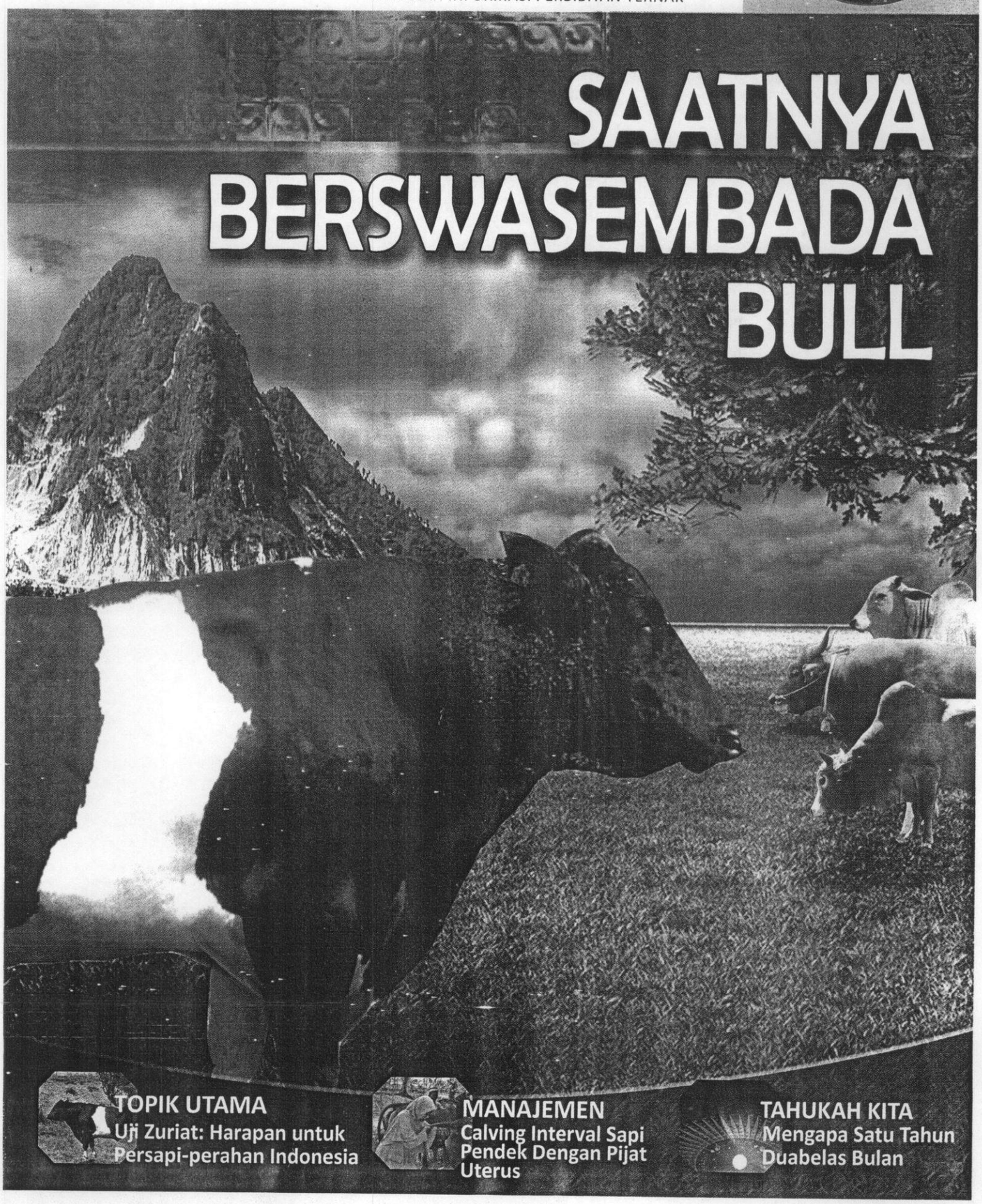

SAATNYA BERSWASEMBADA BULL

TOPIK UTAMA
Uji Zuriat: Harapan untuk Persapi-perahan Indonesia

MANAJEMEN
Calving Interval Sapi Pendek Dengan Pijat Uterus

TAHUKAH KITA
Mengapa Satu Tahun Duabelas Bulan

SWASEMBADA BULL

Oleh Muladno
Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak, dan
Kepala Laboratorium Genetika Molekuler Ternak Fapet IPB

Ada wacana baru tentang swasembada *bull* (sapi pejantan unggul). Mudah-mudahan ini tidak karena latah dengan adanya swasembada daging sapi dan kerbau dan berharap semoga wacana ini memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam rangka mendukung swasembada produk peternakan secara umum. Saya belum tahu detail programnya dan belum pernah membaca dokumen resmi tentang swasembada *bull* (jika telah diterbitkan). Di sini saya hanya ingin beropini tentang hal tersebut dan semoga bermanfaat.

Jika swasembada daging didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan 90% daging dari dalam negeri (ternak lokal murni maupun ternak hasil persilangannya) dan 10% dari impor (daging dan sapi potong bakalan), apakah definisi swasembada *bull*?. Bagaimana situasi tentang keberadaan *bull* saat ini? Mencukupi atau masih kekurangan? Apakah *bull* nya berupa sapi lokal (sapi Bali atau Madura atau lainnya) atau sapi impor (seperti sapi Limousin atau Simmental atau lainnya)?

Melihat usaha peternakan sapi (khususnya berskala kecil) di Indonesia saat ini, saya berpendapat bahwa *bull* yang dimaksud dalam wacana ini adalah *bull* sapi

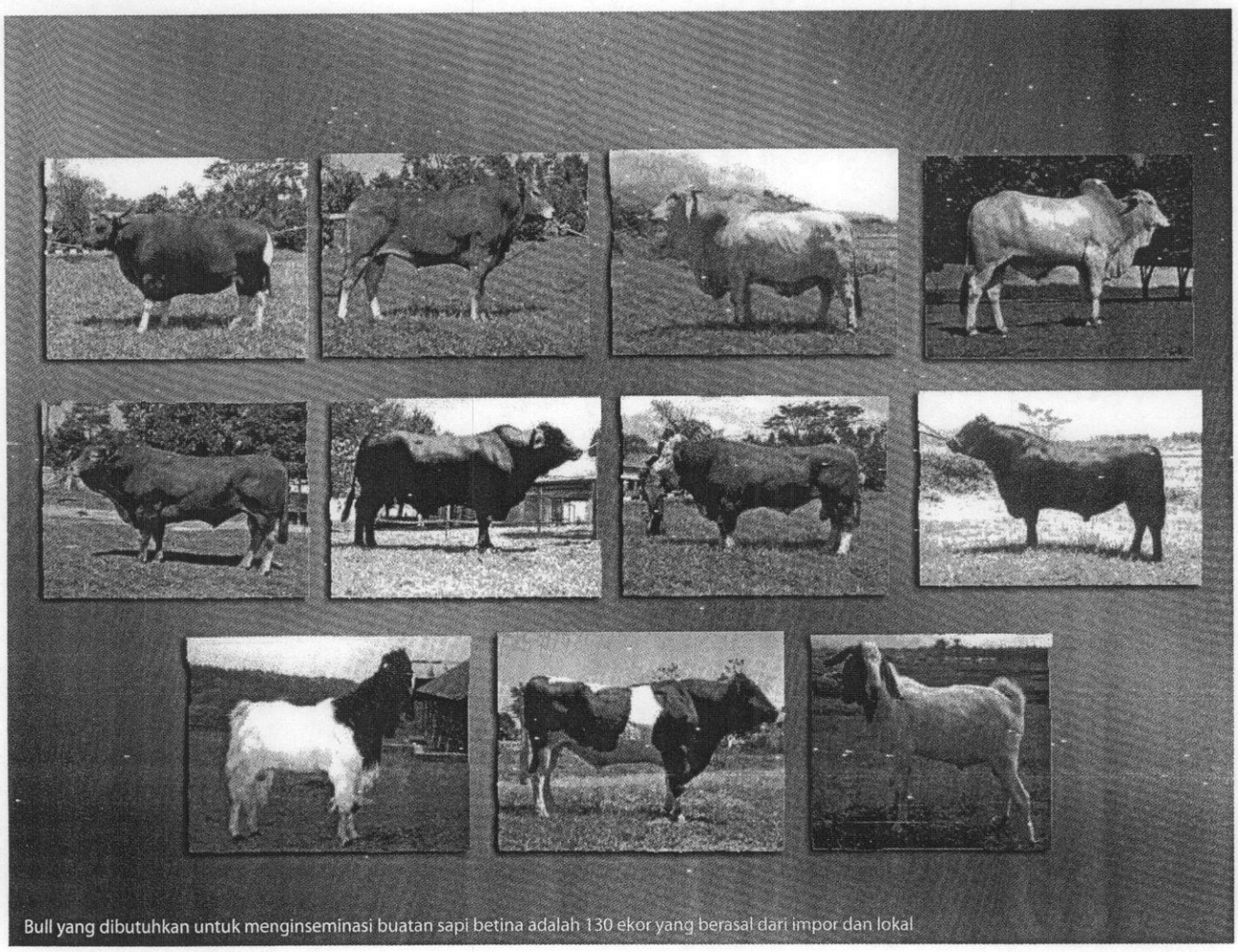

Bull yang dibutuhkan untuk menginseminasi buatan sapi betina adalah 130 ekor yang berasal dari impor dan lokal

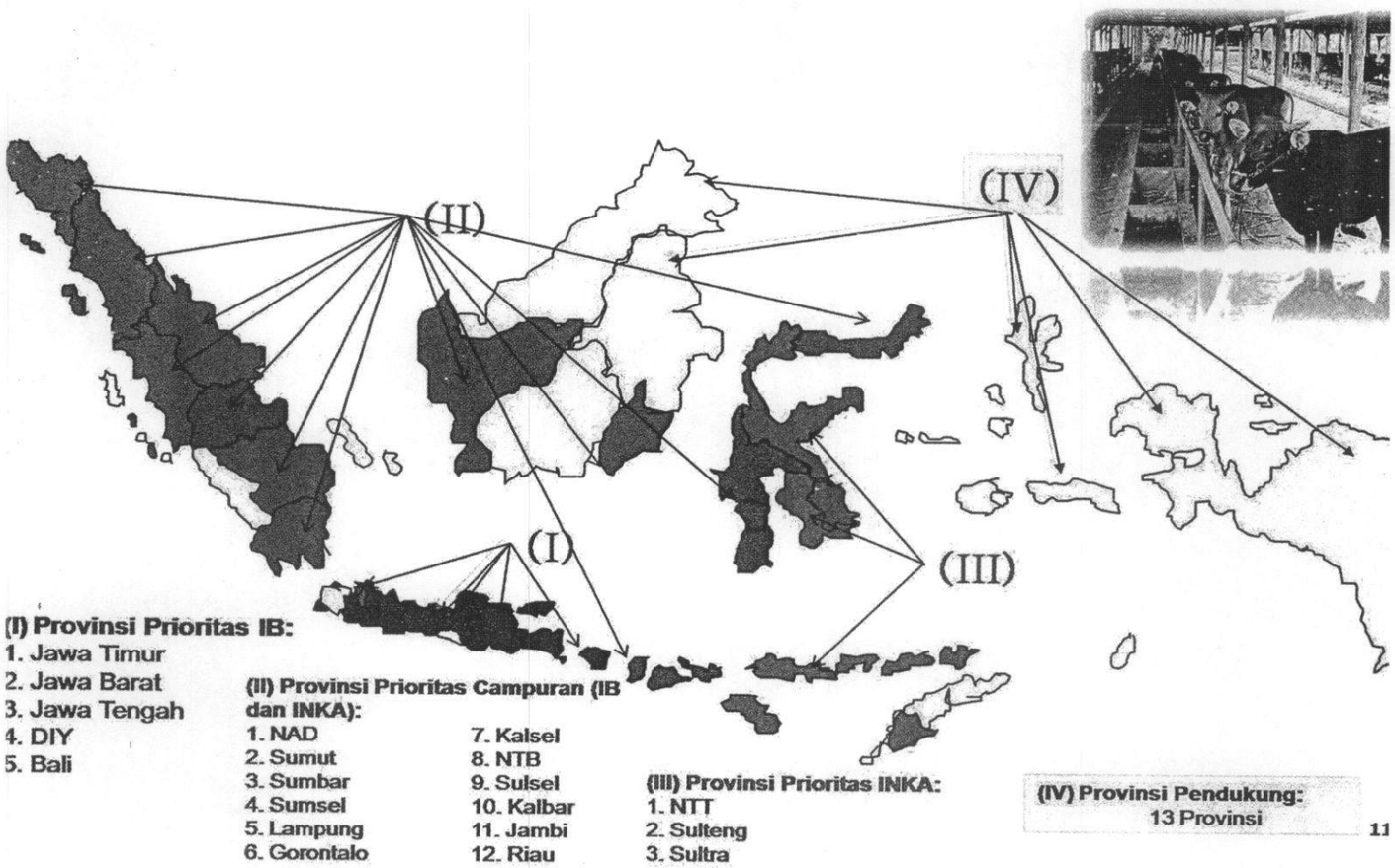

Distribusi semen Bull yang tepat sasaran dan menekan derajat inbreeding cermin kesuksesan swasembada bull

impor dan *bull* sapi lokal karena memang masyarakat beternak dua macam sapi tersebut yaitu sapi persilangan dan sapi lokal murni. Sebenarnya berapa jumlah *bull* yang dibutuhkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan betina dewasa yang siap dikawinkan?

Hasil sensus 2011 menyajikan data bahwa jumlah total sapi potong di Indonesia adalah 14.8 juta ekor dengan jumlah tersedikit di provinsi DKI Jakarta (1691 ekor) dan terbanyak di provinsi Jawa Timur (4.7 juta ekor). Dari jumlah total tersebut, jumlah sapi betina dewasa sebanyak 6.7 juta ekor dengan rincian sapi Bali (2.2 juta ekor), sapi PO (2.1 juta ekor), sapi Madura (0.6 juta ekor), dan sapi lainnya (1.8 juta ekor). Anggap saja, jumlah betina yang diinseminasi buatan adalah 70% nya, maka semen yang dibutuhkan sebanyak 9.4 juta *straw* (dengan asumsi S/C nya adalah 2.0).

Menurut pakar reproduksi FKH UGM, setiap *bull* mampu menghasilkan 24 ribu *straw* per tahun atau sekitar 144 ribu *straw* selama dipelihara sebagai penghasil semen (sekitar enam tahun). Dengan perhitungan sederhana, maka jumlah *bull* yang dibutuhkan untuk menginseminasi buatan sapi betina adalah 65 ekor. Untuk tidak menambah derajat *inbreeding* pada populasi sapi potong yang berakibat menurunkan produktivitas dan reproduktivitas ternak, maka jumlah *bull* yang harus disediakan berlipat dua kali (sehingga perlu 130 *bull*). Jumlah ini cukup kalau hanya ditampung di BBIB Singosari dan BIB Lembang karena pada tahun 2006 saja jumlah total *bull* yang dipelihara di dua balai inseminasi buatan tersebut sudah lebih dari 140 ekor.

Bull dapat diperoleh melalui pemuliaan sendiri (jika sapi lokal) maupun melalui impor (jika sapi eksotik) walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk menghasilkan *bull* eksotik melalui pemuliaan sendiri. Artinya, secara teoritis untuk mendapatkan 130 ekor *bull* per tahun (*Sumber: Balai Embrio Ternak Cipelang*) tidak mengalami kesulitan. Yang membuat sulit adalah untuk mendapatkan *bull* sejumlah itu dengan mutu genetik tinggi. Namun demikian, sepanjang ada anggaran yang memadai, pengadaan *bull* bermutu genetik tinggi juga tidak ada kendala mestinya.

Jadi, menurut hemat saya, yang lebih penting terkait *bull* ini bukan dalam hal jumlah yang harus disediakan (sehingga dapat mengklaim swasembada *bull*) tetapi bagaimana mendistribusikan semen yang dihasilkan setiap *bull* secara tepat sasaran dan mampu menekan derajat *inbreeding* dimanapun populasi sapi betina akseptor berada. Oleh karena itu pengelolaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) inseminasi buatan milik pemerintah pusat dan milik pemerintah daerah mestinya dilakukan secara terpadu walaupun proses produksi semen tetap dilakukan secara otonomi di masing-masing UPT/UPTD. Ini memerlukan kebersamaan, kekompakan, dan komitmen dari setiap pimpinan UPT/UPTD di bawah koordinasi Direktorat Perbibitan. Agar diperoleh hasil optimal, pakar bidang reproduksi, genetika, dan pemuliaan ternak perlu dilibatkan dalam implementasi di lapangan sebagai pendamping.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, *grand design* pemanfaatan dan pendistribusian semen hasil produksi BBIB Singosari, BIB Lembang, dan BIBD secara terpadu di seluruh wilayah Indonesia yang didasarkan pada kaidah pemuliaan dan genetik lebih mendesak untuk dilakukan. (RDJ)